PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN TRANSPARANSI PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DI BKAD KABUPATEN GORONTALO

Anisa Rahmatia H. Palowa

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Muhammadiyah Gorontalo
anissarhmtia@gmail.com

Felmi D. Lantowa dan Fitria Melynsyah Yusuf

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Felmi.lantowa@umgo.ac.id firiayusuf@umgo.ac.id
(No HP : WhattApss : 08960978878)

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan transparansi publik terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode kuantitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan berasal dari penyebaran kuesioner kepada aparatur pengelola keuangan daerah dengan 33 responden dan dianalisis menggunakan teknik regresi linier berganda diolah dengan menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan dengan nilai kontribusi 40,38% dan (2) Transparansi Publik juga berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan dengan nilai kontribusi 50,92%. Responden menilai bahwa pencatatan dan pelaporan yang sesuai standar serta keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Simpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan transparansi publik secara signifikan mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan, sehingga perlu didorong penerapannya sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Kata kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik, Akuntabilitas Keuangan

***ABSTRACT**:*

This study aims to analyze the effect of the implementation of the Regional Financial Accounting System (SAKD) and public transparency on financial accountability at the Regional Finance and Asset Agency of Gorontalo Regency. This study is a quantitative method study using a descriptive approach. The data collected came from distributing questionnaires to regional financial management officials with 33 respondents and were analyzed using multiple linear regression techniques processed using SPSS version 25. The results of the study indicate that: (1) the implementation of the Regional Financial Accounting System has a positive effect on financial accountability with a contribution value of 40.38% and (2) Public Transparency also has a positive effect on financial accountability with a contribution value of 50.92%. Respondents assessed that recording and reporting according to standards and openness of public information can increase public trust in regional financial management. The conclusion of this study is that the implementation of the regional financial accounting system and public transparency can significantly increase financial accountability, so its implementation needs to be encouraged as part of strengthening good regional governance.

***Keywords:** Regional Financial Accounting System, Public Transparency, Financial Accountability*

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia sebelum diberlakukannya era desentralisasi fiskal cenderung tertinggal dibanding sektor swasta. Kurangnya perhatian terhadap sistem keuangan di sektor publik menyebabkan rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Seiring diberlakukannya otonomi daerah, kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi prioritas, dengan penekanan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Hal ini mendorong perlunya pengelolaan keuangan daerah yang akurat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu instrumen penting untuk mencapai akuntabilitas adalah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan PP No. 12 Tahun 2019. Sistem ini dirancang agar pemerintah daerah mampu menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel, guna memperkuat kontrol publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Meskipun demikian, implementasi SAKD di banyak daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya pemahaman terhadap SAP berbasis akrual.

Fenomena tersebut juga terlihat di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo, di mana hasil observasi menunjukkan bahwa sistem akuntansi berbasis akrual belum diterapkan secara optimal. Hal ini berdampak pada rendahnya akuntabilitas pelaporan keuangan dan minimnya partisipasi publik dalam pengawasan keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan yang rendah, kurangnya publikasi hasil audit BPK, dan hambatan aksesibilitas informasi oleh masyarakat menjadi indikator lemahnya transparansi. Padahal, transparansi publik memainkan peran penting dalam mendorong terciptanya akuntabilitas, karena memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan pengelolaan dana publik.

Berbagai penelitian telah mengungkap hubungan positif antara penerapan sistem akuntansi yang baik dengan peningkatan akuntabilitas keuangan. Penelitian oleh Sihombing (2023) menunjukkan bahwa sistem akuntansi, transparansi publik, aktivitas pengendalian, dan penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Namun, temuan Jumardi dan Abdul Khalik (2023) berbeda, di mana transparansi publik tidak berpengaruh secara signifikan. Perbedaan hasil ini menjadi celah

penelitian yang relevan untuk ditinjau lebih lanjut, khususnya dalam konteks BKAD Kabupaten Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan SAKD dan transparansi publik terhadap akuntabilitas keuangan di BKAD Kabupaten Gorontalo. Tujuan khusus penelitian ini adalah: (1) menganalisis pengaruh penerapan SAKD terhadap akuntabilitas keuangan; (2) mengkaji pengaruh transparansi publik dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan; dan (3) menilai pengaruh simultan antara penerapan SAKD dan transparansi publik terhadap akuntabilitas keuangan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang akuntansi sektor publik dan menjadi referensi bagi penelitian lanjutan. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi BKAD Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan efektivitas sistem akuntansi dan transparansi pengelolaan keuangan. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya keterlibatan publik dalam pengawasan keuangan daerah, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Stewardship

Teori stewardship yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991) menjelaskan bahwa manajemen bertindak sebagai pelayan (steward) yang mengutamakan kepentingan organisasi dan pemangku kepentingan, bukan kepentingan pribadi. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, teori ini menekankan pentingnya pertanggungjawaban (accountability) dan transparansi dalam pencatatan serta pelaporan keuangan. Sistem akuntansi berbasis akrual yang digunakan oleh pemerintah daerah menjadi sarana dalam mewujudkan pertanggungjawaban ini (Abdillah, 2020; Siregar, 2019).

Good governance

Sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo (2018) dan Rizal Djalil (2018), menuntut adanya sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, dan responsif terhadap kepentingan publik. Dalam hal ini, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

(SAKD) menjadi instrumen penting dalam mendukung prinsip-prinsip good governance, dengan menyediakan informasi keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik menurut Mardiasmo (2021) adalah sistem informasi keuangan yang digunakan untuk mencatat, melaporkan, dan mengevaluasi penggunaan dana publik. Penerapan akuntansi sektor publik secara efektif berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi alokasi sumber daya di sektor publik.

Partisipasi Publik

Partisipasi publik, menurut Putri (2019), merupakan komponen penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran dan pengambilan keputusan dapat memperkuat transparansi serta mengurangi potensi penyalahgunaan dana publik (Prabowo, 2021). Transparansi yang tinggi memungkinkan publik untuk mengakses dan mengevaluasi dokumen serta laporan keuangan daerah secara mudah dan akurat (Julita & Abdullah, 2020; Widodo, 2021).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

SAKD merupakan seperangkat prosedur dan praktik yang mencakup pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah daerah berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku. SAKD yang efektif diharapkan mampu menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan (Permendagri No. 90 Tahun 2019; Yunita, 2019). Aspek penting dalam SAKD meliputi kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, pencatatan yang sistematis, pelaporan periodik, serta sistem pengendalian aset, penerimaan, dan pengeluaran daerah (Halim, 2012; Permendagri No. 64 Tahun 2013).

Transparansi Publik

Transparansi publik, sebagaimana dijelaskan oleh Purwati (2021) dan Kristiaten dalam Julita & Abdullah (2020), mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat secara mudah diakses, jelas, dan

berkualitas. Transparansi bukan hanya menyangkut keterbukaan data, tetapi juga cara penyampaian informasi yang memungkinkan masyarakat melakukan kontrol dan evaluasi kebijakan fiskal pemerintah.

Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan, sebagaimana dirumuskan oleh Halim (2019) dan Mahmudi (2020), adalah bentuk kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan publik secara terbuka, jujur, dan sesuai ketentuan. Dimensi akuntabilitas meliputi akuntabilitas hukum, manajerial, program, finansial, dan kebijakan. Dengan adanya sistem pelaporan keuangan yang akurat dan transparan, maka pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik dapat ditingkatkan.

Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1) H1: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pada BKAD Kabupaten Gorontalo.
2) H2: Transparansi publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pada BKAD Kabupaten Gorontalo.
3) H3: Penerapan SAKD dan transparansi publik secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pada BKAD Kabupaten Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menguji hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik, dan akuntabilitas keuangan. Penelitian dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo, yang berlokasi di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama tiga bulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BKAD Kabupaten Gorontalo yang berjumlah 69 orang. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan, pelaporan,

dan pengendalian keuangan serta transparansi informasi keuangan. Teknik ini dipilih agar data yang dikumpulkan relevan dengan tujuan penelitian dan mampu menggambarkan kondisi aktual di lapangan. yaitu dari Februari hingga April 2025.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen kuisioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian. Kuisioner dibagikan langsung kepada responden dan diisi secara manual maupun digital. Untuk memastikan kualitas instrumen, dilakukan uji validitas dengan mengkorelasikan setiap item terhadap total skor variabel, serta uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha dengan ambang batas ≥ 0,60. Kuisioner yang valid dan reliabel menjamin bahwa data yang diperoleh akurat dan konsisten.

Data yang terkumpul dianalisis melalui dua tahapan, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta nilai masing-masing variabel melalui perhitungan rata-rata, frekuensi, dan standar deviasi. Sementara itu, analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan regresi linier berganda. Sebelum dilakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas**,** dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat analisis statistik.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu uji parsial (uji-t) untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, uji simultan (uji-F) untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama, serta uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Seluruh pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25**.**

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini melibatkan sebanyak 69 orang responden yang merupakan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo yang secara langsung menangani proses pengelolaan serta pelaporan keuangan daerah. Responden tersebut berasal dari tiga bidang utama, yaitu Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, dan Bidang Anggaran. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang dibagikan secara online menggunakan tautan Google Form maupun secara langsung

di kantor BKAD Kabupaten Gorontalo. Dari jumlah responden tersebut, 19 orang atau 58,6% berjenis kelamin laki-laki dan 14 orang atau 42,4% adalah perempuan, dengan variasi usia yang beragam; kelompok usia di bawah 30 tahun terdiri dari 4 responden atau sebesar 12,1%, sementara mayoritas berada dalam rentang usia 40–50 tahun sebanyak 17 orang atau 51,5%. Selain itu, terdapat 12 responden atau 36,4% yang berusia di atas 50 tahun. Data yang terkumpul melalui survei diuji validitasnya menggunakan uji korelasi Pearson, dan seluruh item pertanyaan terbukti memiliki tingkat validitas yang tinggi. Pengujian reliabilitas menggunakan metode Cronbach's Alpha juga menunjukkan bahwa instrumen yang mengukur variabel seperti Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Transparansi Publik terhadap Akuntabilitas Keuangan memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Selanjutnya, uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa residual memiliki distribusi normal, sedangkan uji multikolinearitas memperlihatkan tidak adanya hubungan korelasi yang tinggi antar variabel independen, dengan nilai VIF kurang dari 10 serta nilai tolerance di atas 0,1. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode Glejser dan hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga analisis regresi dapat dianggap andal. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Teknik ini juga dimanfaatkan untuk memperkirakan nilai variabel dependen saat terjadi perubahan nilai pada variabel independen, serta untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah menunjukkan hubungan positif atau negatif (Priyatno, 2023:116).

Tabel 1.

Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,883	5,957		1,155	,257
	SAKD	,416	,205	,303	2,027	,052
	Transparansi	,542	,144	,562	3,766	,001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber : Data diolah SPSS 25,2025

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.13 diatas, pada kolom *Unstandardized Coefficients* (B), didapatkan persamaan regresi linier berganda dari penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 6{,}883 + 0{,}416X_1 + 0{,}542X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Keuangan

X_1 = Penerapan SAKD

X_2 = Transparansi Publik

e = error atau variabel gangguan

Berdasarkan hasil bersamaan regresi, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta a = 6,883 berarti, jika tidak ada ada penerapan SAKD (X1=0) dan tidak ada transparansi publik (X2= 0), maka nilai akuntabilitas keuangan (Y) diprediksi sebesar 6,883. Ini merupakan nilai dasar atau awal dari akuntabilitas keuangan tanpa adanya kontribusi dari kedua variabel independen.
2. Nilai koefisien regresi variabel Penerapan SAKD (X1) bernilai positif b_1 = 0,416 nilai ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam penerapan SAKD akan meningkat akuntabilitas keuangan sebesar 0,416 satuan. Sebagai contoh, jika suatu daerah meningkatkan penerapan SAKD dari skla 3 menjadi 4, maka akuntabilitas keuangan di daerah tersebut diprediksi akan meningkat sebesar 0,416 poin.
3. Nilai koefisien regresi variabel Transparansi Publik (X2) bernilai positif b_2 = 0,542 nilai ini berarti bahwa setiap peningkatkan satu satuan dalam transparansi publik akan meningkat akuntabilitas keuangan sebesar 0,542 satuan. Misalnya, jika transparansi publik meningkat dari level 2 ke level 3, maka akuntabilitas keuangan diperkirakan akan meningkat sebesar 0,542 poin.

Sedangkan hasil pengolahan menunjukkan nilai koefisien determinasi R square (R2) secara rinci, Penerapan SAKD berkontribusi sebesar 40,38%, sedangkan Transparansi Publik memberikan kontribusi sebesar 50,92%. Sisanya, yaitu sebesar 8,7%, dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil dari uji signifikansi parameter indivudual (Uji Statistik t) dalam satu model regresi linier. Dua varaibel indpenden, X1 ddan X2, diuji untuk mengetahui pengaruhnya terhadap varaibel dependen. diperoleh nilai signifikansi variabel (X1)

sebesar 0,000 < 0,05. Selain itu nilai t hitung (4,945) > t tabel (2,042). Hasil uji menunjukkan bahwa penrapan SAKD secara signifikan memenagruhi peningkatan akuntabilitas keuangan. Nilai signifikansi variabel (X2) sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung (9,186) > t tabel (2,042), hasil analsis menunjukkan bahwa transparansi publik memberikan kontribusi nyata terhadap terciptanya akuntabilitas keuangan. Sedangkan uji F menunjukkan nilai signifikansi untuk pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y menunjukkan angka 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai F hitung sebesar 156,950 jauh lebih besar dari nilai F tabel yang sebesar 3,32. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara X1 dan X2 secara simultan terhadap Y sangat signifikan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Transparansi Publik terhadap Akuntabilitas Keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, Penerapan SAKD dan Transparansi Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Secara parsial, Penerapan SAKD memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dengan koefisien regresi 0,416, dan Transparansi Publik memiliki koefisien regresi lebih besar sebesar 0,54, dengan signifikansi juga 0,000. Secara simultan, kedua variabel menjelaskan 91,3% variasi akuntabilitas keuangan (Adjusted R^2 = 0,913), dengan kontribusi terbesar berasal dari Transparansi Publik.

Temuan ini diperoleh melalui analisis kuantitatif dengan uji t, uji F, serta analisis deskriptif terhadap indikator masing-masing variabel. Beberapa indikator menunjukkan nilai mean yang rendah, seperti X1.4, X2.4, dan Y10, yang mengindikasikan masih adanya aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pencatatan keuangan dan keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat. Interpretasi dari temuan menunjukkan bahwa optimalisasi penerapan SAKD memperbaiki akurasi dan keandalan laporan keuangan, sementara transparansi publik mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat, sehingga memperkuat akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, kedua variabel saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

Hasil ini mendukung teori akuntansi sektor publik dan teori stewardship, yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab moral aparatur negara. Selain itu, temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Mas'ut et al., 2023; Wulandari, 2021; Sihombing, 2023) yang menegaskan hubungan signifikan antara penerapan sistem akuntansi dan transparansi terhadap akuntabilitas.

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan transparansi publik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan di BKAD Kabupaten Gorontalo. Transparansi publik merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong akuntabilitas, disusul oleh penerapan SAKD. Secara simultan, kedua variabel mampu menjelaskan 91,3% variasi akuntabilitas keuangan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, dan komitmen organisasi. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi sistem keuangan yang andal dan keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

Saran

Perlu peningkatan kualitas penerapan SAKD melalui pelatihan SDM dan evaluasi sistem yang berkelanjutan. Pemerintah daerah juga disarankan untuk memperluas akses informasi keuangan dan meningkatkan partisipasi publik guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, R. (2020). *Implementasi akuntansi berbasis akrual di sektor publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Halim, A. (2012). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Jumardi, & Khalik, A. (2023). *Pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas keuangan daerah*. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan Daerah, 5(1), 45–56.

Julita, D., & Abdullah, R. (2020). Transparansi informasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 115–123.

Kristiaten, Y. (dalam Julita & Abdullah, 2020). *Transparansi dan kontrol publik*. Surabaya: Lintas Ilmu Press.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.

Mas'ut, A., Rakhmawati, N., & Nugroho, B. (2023). *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah*. Jurnal Keuangan Negara, 7(1), 31–42.

Mahmudi. (2020). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prabowo, H. (2021). *Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan publik*. Jakarta: Penerbit Bina Bangsa.

Priyatno, D. (2023). *Statistik deskriptif dan regresi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.

Putri, R. D. (2019). Partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Partisipasi Sosial*, 4(1), 23–30.

Purwati, E. (2021). Transparansi dan akuntabilitas publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16(2), 203–215.

Rizal Djalil. (2018). *Pemerintahan yang baik dan bersih*. Jakarta: LP3ES.

Sihombing, B. (2023). *Pengaruh akuntansi dan transparansi terhadap akuntabilitas keuangan daerah*. Jurnal Akuntansi Publik, 9(1), 77–88.

Siregar, R. (2019). *Penerapan SAP berbasis akrual di pemerintah daerah*. Medan: Pustaka Rakyat.

Widodo, S. (2021). Aksesibilitas informasi publik sebagai pilar transparansi fiskal. *Jurnal Transparansi Keuangan Publik*, 8(2), 66–74.

Wulandari, F. (2021). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem akuntansi pemerintah. *Jurnal Tata Kelola Keuangan*, 10(1), 51–60.